

Pembiayaan Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus

Inclusive education financing for children with special needs

Fachrul Rozie¹, Musdalifah², Imam Syafi'i³, Widyatmike Gede Mulawarman⁴, & Masrur Yahya⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

¹Email: fachrul.rozie@fkip.unmul.ac.id, ²Email: musdalifahdanial@gmail.com, ³Email: aktualisasi@gmail.com,

⁴Email: widyatmike@fkip.unmul.ac.id, ⁵Email: masruryahyaalwi@gmail.com

Abstrak: The concept of inclusive education is to give disabled children equal educational opportunities without discrimination. In Samarinda City and East Kutai Regency, comprehensive education funding is crucial. This paper describes the challenges and solutions of funding inclusive education from preschool to high school. A narrative case study was used in this investigation. The study took place at PAUD Negeri 1 Pembina (kindergarten), State Elementary School 006 Sangkulirang, State Junior High School 1, and State Senior High School 2 Muara Wahau. Four principals, four teachers, and two school committee parents participated in the study. We collected data using semi-structured interviews, direct observation, and document analysis. The data on inclusive education funding were interpreted using thematic analysis. This study focusses on inclusive education implementation and funding. The results show that inclusive education, especially in inclusive schools, emphasises social skills for disabled children. Funding inclusive education in inclusive and non-inclusive schools nationwide needs confirmation and support. The study suggests that it improves inclusive education funding, notably in providing excellent human and learning resources for vocational education in higher education institutions.

Keywords: financing of inclusive education, children with special needs, implementation of inclusive education, challenges & opportunities of inclusive education, qualitative field research

Abstrak: Konsep pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak disabilitas tanpa diskriminasi. Di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur, pendanaan pendidikan yang komprehensif sangatlah penting. Makalah ini menjelaskan tantangan dan solusi pendanaan pendidikan inklusif dari prasekolah hingga sekolah menengah atas. Studi kasus naratif digunakan dalam penelitian ini. Studi ini berlangsung di PAUD Negeri 1 Pembina (TK), Sekolah Dasar Negeri 006 Sangkulirang, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muara Wahau. Empat kepala sekolah, empat guru, dan dua orang tua siswa komite sekolah berpartisipasi dalam studi ini. Kami mengumpulkan data menggunakan wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan analisis dokumen. Data tentang pendanaan pendidikan inklusif diinterpretasikan menggunakan analisis tematik. Studi ini berfokus pada implementasi dan pendanaan pendidikan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif, terutama di sekolah inklusif, menekankan keterampilan sosial bagi anak-anak disabilitas. Pendanaan pendidikan inklusif di sekolah inklusif dan non-inklusif secara nasional membutuhkan konfirmasi dan dukungan. Studi ini menunjukkan bahwa hal ini dapat meningkatkan pendanaan pendidikan inklusif, terutama dalam menyediakan sumber daya manusia dan pembelajaran yang unggul untuk pendidikan vokasi di perguruan tinggi.

Kata kunci: pembiayaan pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus, implementasi pendidikan inklusif, penelitian kualitatif lapangan

Article history

Received:
14 October 2025

Accepted:
21 November 2025

Published:
31 December 2025

© 2025 The Author(s).
Jurnal Ilmu Manajemen dan
Pendidikan by Universitas
Mulawarman

How to cite this article:

Rozie, F., Musdalifah, M., Syafi'i, I., Mulawarman, W. G., & Yahya, M. (2025). Pembiayaan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 5(2), 171–184. <https://doi.org/10.30872/impian.v5i2.5791>

Corresponding author: Fachrul Rozie, Email: fachrul.rozie@fkip.unmul.ac.id



Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

UNESCO mempromosikan pendidikan inklusif, yang berasal dari "Pendidikan untuk Semua", yang berarti pendidikan yang ramah bagi semua dan merangkul semua elemen tanpa batas. Pendidikan memberi setiap orang hak dan kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Siswa berkebutuhan khusus memiliki hak dan kesempatan yang sama terlepas dari kondisi fisik, mental, sosial, emosional, atau ekonomi mereka. Filosofi pendidikan nasional Indonesia mendukung pendidikan inklusif, yang tidak membatasi akses anak-anak ke sekolah berdasarkan keadaan mereka (Hafiz, 2017). Siswa berkebutuhan khusus, yang sering disebut sebagai siswa disabilitas, memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan siswa normal. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 mengatur pendidikan khusus di Indonesia. Setiap orang, terlepas dari disabilitas fisik, emosional, atau mental, berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan khusus diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kesulitan intelektual dan sosial. Menurut Nadya et al (2022) Beberapa siswa berkebutuhan khusus di Indonesia belum menerima pendidikan kewarganegaraan mereka karena berbagai kendala. Pendidikan inklusif dipandang sebagai program pendidikan kesetaraan yang memerlukan penguatan pendanaan agar peserta didik mampu meningkatkan aktualisasi diri selama proses pembelajaran.

Pendidikan inklusif merupakan mandat global untuk menjamin akses yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), tanpa adanya diskriminasi dan memiliki tujuan kesetaraan sebagai masyarakat dalam hubungan interaksi sosial. (Ainscow, 2020). Di Indonesia, regulasi tentang pendidikan inklusif terus diperkuat (Kurniawati et al., 2019; Sahrudin et al., 2023). Namun, tantangan pendanaan masih menjadi hambatan utama. Pengelolaan pendidikan inklusif tidak sebatas dimensi pendidik, ketersediaan sarana-prasarana dan kurikulum yang relevan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Akan tetapi, manajemen pembiayaan yang tepat sasaran dan berorientasi kebutuhan juga perlu mendapat dukungan dari Pemerintah (Pudjiastuti et al., 2022) agar ekosistem pendidikan melalui program inklusif mampu mem manusia secara utuh.

Istilah ABK di jenjang pendidikan di kenal PDBK (Peserta Didik Berkebutuhan Khusus) yang diklasifikasikan beberapa jenis seperti disabilitas pendengaran, disabilitas penglihatan, disabilitas intelektual, disabilitas fisik-motorik, disabilitas emosi-perilaku, *slow learner, specific learning disability* dan disabilitas lainnya seperti autis, hiperaktif, anak berbakat/istimewa dan Tunaganda (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan et al., 2021; Pendidikan Inklusif, n.d.). Pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional Indonesia untuk MOST UNESCO telah melakukan akuisisi peningkatan layanan inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus melalui pembuatan naskah kebijakan pengembangan riset teknologi untuk penyandang disabilitas melalui BRIN (BRIN, 2024). Akan tetapi, kenyataan di lapangan belum terjadi pemerataan di Indonesia terkait ketersediaan laboratorium dan media penunjang sesuai karakteristik inklusif dan berdampak minimnya prestasi yang dicapai disebabkan keterbatasan bagi siswa berkebutuhan khusus (Suryadi, 2023; Maulida et al., 2023). Dengan kata lain, pendidikan inklusif di Indonesia belum dikatakan sejajar dengan Negara maju seperti Jepang, Finlandia dan Australia (Boyle & Anderson, 2020; Moberg et al., 2020) yang turut melibatkan dalam segala kesempatan di segala bidang pada kehidupan. Ini terjadi disebabkan pembiayaan pendidikan inklusif yang berorientasi kebijakan berbasis kebutuhan siswa di pendidikan inklusif oleh pemerintah setempat.

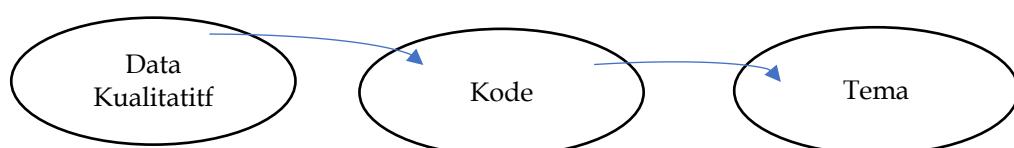
Penelitian berkaitan dengan isu pembiayaan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan di Indonesia dan global sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Namun, kajian analisis pada dua daerah dan jenjang pendidikan berbeda belum ditemukan dari berbagai sumber. Pembiayaan pendidikan inklusif masuk komponen dalam penyusunan anggaran pendidikan yang dianggap sebagai strategi berkelanjutan (Fitriana, 2014; Nafarin et al., 2025). Sharma et al (2019) telah meneliti tentang pelibatan pemangku lokal dan nasional mampu menghasilkan kebijakan pembiayaan inklusif yang tepat. Kebijakan berupa fasilitas pendidikan inklusif untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan SDM tenaga pengajar yang handal (Buchner & Poyer, 2020). Begitu juga (Adams et al., 2025) menyoroti perbandingan pendidikan inklusif di Malaysia, Laos dan Brunei masih membutuhkan investasi pembiayaan dalam ketersediaan sarana-prasarana yang memadai. (Lopatina et al., 2024) juga meneliti untuk mendeskripsikan dukungan pendidikan inklusif di Ukraina hingga perguruan tinggi yang menganut azaz praktik terbaik dalam dukungan pendidikan, organisasi, psikologis, pedagogis, dan sosial bagi siswa penyandang disabilitas. (Tah, 2025) juga menginvestigasi implementasi pendidikan inklusif di Kamerun menunjukkan ketidakcukupan kebijakan yang mendukung pembiayaan bagi sekolah-sekolah serta hambatan sosial lainnya yang dirasakan guru.

Berdasarkan gap penelitian di atas, peneliti mengeksplorasi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia dalam konteks pembiayaan pendidikan yang difokuskan di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas pembiayaan pendidikan inklusif dipengaruhi sistem pendanaan berbasis kebutuhan (*needs-based funding*) lebih efektif dibanding model input tradisional dan memandang skema pembiayaan pendidikan khusus sebagai investasi pendidikan jangka panjang (Makoelle & Burmistrova, 2020; Meijer & Watkins, 2019). Studi ini mengkaji pembiayaan pendidikan inklusif dari pra-TK hingga SMA. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti tantangan dalam implementasi dan pendanaan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Alasan menggunakan pendekatan ini, menurut Nurrisa et al (2025) Penelitian kualitatif mengkaji kejadian, peristiwa, aktivitas sosial, persepsi, dan pemikiran individu atau kelompok. Desain studi kasus mengkaji secara intensif seseorang atau kelompok dalam skenario tertentu. Studi kasus ini mengkaji implementasi dan pembiayaan pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif atau sekolah dengan guru berpengalaman dan pengetahuan pembelajaran inklusif. Adapun partisipan penelitian terdiri empat Kepala Sekolah dan empat guru (TK s/d. SMA) di Kota Samarinda dan Sangatta. Juga wawancara pada dua orangtua sebagai Komite di jenjang TK dan SMA yang merupakan sekolah inklusif

Peneliti memilih lokasi pengambilan data di TK Negeri Pembina 1 Kota Samarinda, SD Negeri 006 Sangkulirang, SMP Negeri 1 Sangkulirang dan SMA Negeri 2 Muara Wahau yang masuk kriteria *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi langsung dan studi dokumentasi terhadap proses pembelajaran inklusif dan dokumen pembiayaan pendidikan inklusif. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 01 September s/d 07 Oktober 2025 oleh peneliti di lokasi berbeda. Analisis data menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*). Catatan wawancara yang ditranskripsi diberi kode untuk memulai analisis. Kode-kode tersebut merangkum data yang dianalisis. Grafik konseptual menunjukkan hubungan konseptual naratif-inkuirি dari kode-kode yang diberi label dan dianalisis (Castleberry & Nolen, 2018; Lochmiller, 2021).



Gambar 1. Analisis Tematik (Maria Rosala, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan pengambilan data di empat lokasi penelitian ; PAUD Negeri 1 Samarinda, SD Negeri 006 Sangkulirang, SMP Negeri 1 Sangkulirang dan SMA Negeri 2 Muara Wahau terkait pembiayaan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus, dihasilkan dua tema temuan penelitian, (1). Implementasi Pendidikan Inklusif untuk Siswa Berkebutuhan Khusus; dan (2) Pembiayaan Pendidikan Inklusif untuk Siswa Berkebutuhan Khusus.

1. Implementasi Pendidikan Inklusif untuk Siswa Berkebutuhan Khusus

Program pendidikan inklusif di Kota Samarinda dan Sangatta diimplementasikan melalui berbagai kebijakan setempat baik di jenjang TK (PAUD Formal) hingga SMA Negeri. Sebagaimana pendapat Fatmawiyati & Permata (2023:569) penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan melalui penyusunan kurikulum, prinsip pembelajaran yang digunakan, ketersediaan sarana prasarana, evaluasi pembelajaran, prosedur penerimaan siswa ABK, sumber daya manusia, rasio siswa ABK dalam rombongan belajar dan keterlibatan orangtua. Hal ini disebabkan anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama dengan

yang lain untuk hidup layak dengan pendidikan yang menfasilitasi kehidupannya di masa mendatang (Firdaus, 2010; Utama, 2021).

a. TK Negeri 1 Pembina Samarinda

TK Negeri 1 Pembina Samarinda melaksanakan pendidikan inklusif melalui penunjukkan sebagai sekolah inklusif oleh Dinas Pendidikan. Juga memberdayakan rekrutmen guru pendamping untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus terutama usia 4-6 tahun.

“...Kami disini biasanya merekrut mahasiswa yang pernah magang selama beberapa bulan untuk terlibat dalam pendampingan anak berkebutuhan khusus serta diberikan pembekalan bagaimana menangani kebutuhan belajar mereka di kelas. Ini disebabkan sekolah kami telah mendapatkan penunjukan langsung sebagai salah satu sekolah inklusif di Kota Samarinda”... (#CW01#Ibu Ro#Kepala Sekolah TK Negeri 1 Pembina#20 September 2025).

Dapat dipahami, proses belajar di kelas TK tidak membedakan fasilitas sarana-prasarana. Di lingkungan TK Negeri 1 Samarinda dilengkapi berbagai media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Juga pihak sekolah menerapkan metode tutor teman sebaya untuk mengajarkan anak lainnya menerima anak berkebutuhan khusus dalam melatih kemampuan bersosialisasi. Sebagaimana hasil kutipan wawancara dengan salah satu guru pendamping berikut.

“....Anak berkebutuhan khusus di kelas saya ada beberapa dan mereka diterima dengan baik. Ini terjadi karena penggunaan metode tutor teman sebaya dimana anak bergantian menjadi pendamping ketika temannya kesulitan, terutama anak berkebutuhan khusus. Selain itu, saya juga bertugas untuk mendampingi siswa tersebut berdasarkan arahan Wali Kelas . Biasanya setiap seminggu sekali di hari Sabtu diadakan rapat mingguan untuk membahas perkembangan anak berkebutuhan khusus tersebut untuk ditindaklanjuti oleh orangtua/wali murid”... (#CW02#Ibu SS#Guru Pendamping#22 September 2025).



Gambar 1. Kegiatan Guru menjelaskan contoh-contoh baik dan pendampingan tutor teman sebaya di kegiatan luar kelas
(Sumber: Dokumentasi Peneliti di TK Negeri 1 Pembina, 2025)

Konteks implementasi pendidikan inklusif di satuan PAUD memprioritaskan bagaimana lingkungan yang nyaman, aman dan berorientasi terhadap perkembangan anak. Temuan penelitian di TK Negeri 1 Pembina menunjukkan keberadaan tutor sebaya bagi ABK untuk menciptakan lingkungan inklusivitas dan mendukung semua perkembangan peserta didik maka, TK Negeri 1 Samarinda mengembangkan program tutor sebaya. Program ini melibatkan peserta didik untuk menjadi pendamping dan mentor bagi peserta didik dengan disabilitas yang membutuhkan dukungan tambahan, baik dalam aspek akademik maupun sosial yang disebut program AKSIL (Anak Kreatif Sehat, Inovatif Sayang lingkungan). Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh kajian Insiatun., et al (2021) bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di jenjang PAUD untuk mengakomodasi kebutuhan anak dan dapat dilakukan melalui menghasilkan lingkungan belajar yang berpotensi siswa ABK mampu bersosialisasi dengan baik.

Sementara, proses rekrutmen siswa ABK dijelaskan lebih mendalam oleh Ibu Ro sebagai Kepala TK. Menurutnya, siswa ABK dilakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi sejauhmana capaian perkembangan yang dimiliki. Berikut merupakan kutipan manuskrip wawancara bersama Ibu Ro.

“....Pelaksanaan inklusivitas ini melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang dapat belajar bersama dalam lingkungan yang mendukung seperti: Asesmen awal atau identifikasi kebutuhan peserta didik dan asesmen diagnostic, Pelibatan orang tua dan komite, penggunaan metode atau perencanaan pembelajaran inklusif serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan program kami juga dilakukan secara terjadwal setiap hari Selasa sampai dengan Kamis pada pukul 08.30 WITA, dengan didampingi guru yang telah dibentuk dan terjadwal. Peserta didik terlibat langsung, secara bergantian sesuai jadwal yang telah disusun bersama kegiatan ini kami sampaikan kepada orang tua saat mereka mendaftar termasuk menyampaikan bahwa sekolah kami adalah sekolah inklusif yang didalamnya ada peserta didik dengan disabilitas....”(#CW03#Ibu Ro#Kepala TK Negeri 1 Pembina Samarinda#20 September 2025).

“...kami juga memiliki kerja sama berbentuk kolaborasi dengan beberapa komunitas seperti Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI), Lembaga Grahitan Indonesia dan puskesmas yang bertujuan untuk semaksimal mungkin memberikan layanan pada siswa kami tanpa membedakan...”(#CW04#Ibu Ro#Kepala TK Negeri 1 Pembina Samarinda#20 September 2025).



Gambar 2. Pengenalan Budaya Pada ABK di TK Negeri 1 Pembina Samarinda
 (Sumber: Dokumentasi Peneliti di TK Negeri 1 Pembina, 2025)

Temuan penelitian di TK Negeri 1 Pembina Samarinda mendeskripsikan bahwa implementasi pendidikan inklusif telah dilaksanakan dengan baik melalui strategi pelibatan berbagai pihak dan komunitas masyarakat. Semangat sekolah tersebut dapat disimpulkan sebagai wadah yang aman bagi siswa ABK yang dibuktikan dengan metode tutor teman sebaya dalam proses belajar agar siswa lainnya menerima dengan baik dan orangtua lainnya juga memahami bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama baik dalam pendidikan serta kehidupan sehari-hari terutama di TK Negeri 1 Pembina Samarinda.

Temuan penelitian ini didukung oleh Kozibroda et al., (2020), yang menekankan implementasi pendidikan inklusif tergantung pada keyakinan dan penerimaan yang baik terhadap keberadaan siswa ABK. Dalam konteks penelitian ini, tindakan yang dilakukan oleh Ibu Ro menunjukkan dukungan sepenuhnya pada program pendidikan inklusif di jenjang PAUD dengan melibatkan berbagai pihak dan kolaborasi orangtua siswa di lingkungan sekolah.

Penelitian lainnya juga mengungkap bahwa isu pendidikan inklusif menjadi transformasi perubahan kurikulum abad-21 terutama penyiapan SDM yang memahami dengan baik praktik penyelenggaraan pendidikan inklusif di segala jenjang pendidikan (Graham, 2023).

b. SDN 006 Sangkulirang & SMPN 1 Sangkulirang

Pada lokasi penelitian di SDN 006 Sangkulirang dan SMPN 1 Sangkulirang, peneliti mendapati temuan tentang implementasi pendidikan inklusif masih terbatas ditinjau aspek ketersediaan sarana-prasarana. Dua sekolah ini ditunjuk sebagai sekolah inklusif, namun dukungan dari Pemerintah belum maksimal. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil kutipan manuskrip wawancara dengan Bapak Ma dan Ibu Ra sebagai pendidik di SDN 006 Sangkulirang dan SMPN 1 Sangkulirang.

“...di tempat saya (SDN 006) itu menerima siswa ABK juga. Tetapi, pembelajaran yang saya terapkan menyesuaikan karakteristik siswa tersebut. Karena kualifikasi saya sebagai lulusan S-2 Pendidikan Luar Biasa maka proses belajar menggunakan pendekatan pembelajaran individual dengan media yang sering saya kembangkan sendiri (media adaptif) dan belum ada fasilitas berupa ruang terapi dan ruang sensorik....” (#CW05#Bapak Ma#Pendidik SDN 006 Sangkulirang#08 September 2025).

“...tentang siswa ABK di SMPN 1 Sangkulirang terutama di kelas saya masih belajar untuk memahami dengan baik dan memberikan pemahaman pada siswa regular terkait keberadaan siswa disabilitas. Ini karena saya baru menyelesaikan pendidikan saya di jurusan Pendidikan Luar Biasa. Fasilitas yang dimiliki juga hanya akses untuk disabilitas pengguna kursi roda menuju ke toilet”...(#CW11#Ibu Ra#Pendidik SMPN 1 Sangkulirang#09 September 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pendidik di SDN 006 Sangkulirang dan SMPN 1 Sangkulirang menghadapi tantangan yang besar dalam menangani keberadaan siswa ABK. Minimnya fasilitas yang memadai untuk belajar siswa ABK di sekolah negeri terutama ketersediaan media penunjang yang sesuai karakteristik disabilitas yang dimiliki. Temuan penelitian ini relevan dengan kajian Maulida et al., (2023) menyimpulkan implementasi pendidikan inklusif di SD mengalami ketidakmerataan layanan pendidikan yang berkualitas terutama di daerah Kabupaten dan minimnya ketersediaan Guru Pendamping Khusus yang disediakan oleh Pemerintah. Dalam konteks hasil penelitian ini, di dua lokasi tersebut juga masih minim kegiatan pelatihan maupun workshop yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan setempat maupun Gugus atau Komunitas lainnya untuk pendidik yang mendapat penunjukan oleh Sekolah sebagai Guru Pendamping Khusus.

Hasil penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa fenomena di masyarakat Indonesia masih terjadi penolakan terhadap ABK dan kurang optimal kolaborasi antar orangtua dan pendidik maupun sekolah untuk mendukung pendidikan inklusif terutama untuk usia bersekolah (Sangadjji, 2022). Berbeda di Negara Maju, keberadaan siswa ABK lebih dihargai dan sebagian besar orangtua menginginkan pendidik lebih memahami dengan baik karakteristik dan perbedaan disabilitas dalam memberikan praktik pembelajaran (Paseka & Schwab, 2020). Sebagaimana harapan Bapak Ma dan Ibu Ra dalam kutipan hasil wawancara berikut:

“...Tantangan yang saya rasakan adalah keterbatasan guru pendamping khusus dan harapannya tentu Pemerintah menyediakan pelatihan dan fasilitas media memadai dan pendampingan psikolog agar pendidikan inklusif berjalan maksimal, terutama di SDN 006 Sangkulirang...” (#CW08#Bapak Ma#Pendidik SDN 006 Sangkulirang#08 September 2025).

“...Tantangan untuk saya secara personal ialah bagaimana saya sebagai pendidik mampu memahami mereka (siswa disabilitas) dengan baik, tanpa mengesampingkan anak regular lainnya. Juga saya rasa perlu adanya pelatihan berkelanjutan dan terjadwal agar mampu memanajemen waktu pembelajaran untuk mereka dan siswa regular...” (#CW12#Ibu Ra#Pendidik SMPN 1 Sangkulirang#09 September 2025).



Gambar 3. Proses Wawancara dengan Pendidik SDN 006 dan SMPN 1 Sangkulirang
(Sumber: Dokumentasi Peneliti di TK Negeri 1 Pembina, 2025)

c. *SMAN 2 Muara Wahau*

Konteks implementasi pendidikan inklusif di jenjang SMA diketahui bahwa SDM pendidik ditunjuk melalui SK Penugasan oleh Kepala Sekolah dan mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan pendampingan siswa didik disabilitas. Sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan Ibu FL sebagai Pendidik siswa ABK di SMAN 2 Muara Wahau.

“...Latar belakang saya adalah pendidikan umum dan telah mendapat pelatihan dasar pembelajaran berdiferensiasi, konseling dan pengembangan bahasa isyarat bagi guru sma/smk di tahun 2025 di tanggal 22 Agustus 2025. Hal ini jadi bekal awal untuk menangani ABK...” (#CW02#Ibu FL#Pendidik SMAN 2 Muara Wahau#29 September 2025).

Dari hasil wawancara di atas, dipahami ada keterbatasan pendidik khusus siswa ABK juga terjadi di SMAN 2 Muara Wahau sehingga sekolah membuat kebijakan terkait dengan pemberdayaan SDM yang ada. Hasil pengamatan peneliti di lapangan juga ditemukan siswa ABK mengikuti proses belajar dengan siswa reguler dengan pemanfaatan fasilitas yang ada. Namun, perencanaan pembelajaran terpisah dengan siswa reguler yakni menggunakan Program Pembelajaran Individual (PPI). Sebagaimana pernyataan Ibu FL berikut.

“...Keberadaan PDBK (Peserta Didik Berkebutuhan Khusus) menurut saya sangat positif karena menumbuhkan keragaman dan sikap empati dan mendorong guru untuk kreatif dalam merancang pembelajaran. Saya pun membuat Perencanaan pembelajaran dilakukan dengan menyusun Individualized Education Plan (IEP) yang disesuaikan dengan karakteristik disabilitas dan ada pelibatan dengan orangtua dan guru BK serta SMAN 2 Muara Wahau merupakan sekolah inklusif...” (#CW03#Ibu FL#Pendidik SMAN 2 Muara Wahau#29 September 2025).

Dari hasil wawancara peneliti di atas, dikonfirmasi SMAN 2 Muara Wahau termasuk sebagai salah satu sekolah inklusif yang ada. Dengan kata lain, keberadaan siswa ABK harus terlayani secara adil dan merata dengan siswa reguler tanpa membeda-bedakan. Penelitian lain menunjukkan bahwa lulusan SMA sudah cukup matang untuk terjun ke masyarakat, sehingga memerlukan kemampuan komunikasi yang baik untuk meningkatkan kualitas hidupnya (Taufik & Rahaju, 2021). Dengan kata lain, layanan pendidikan inklusif di SMAN 2 Muara Wahau juga menekankan kesiapan siswa ABK untuk mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik.

Selanjutnya, saat peneliti menanyakan apa tantangan dan harapan terhadap implementasi pendidikan inklusif di SMAN 2 Muara Wahau, Ibu FL menjawab sebagai berikut.

“...Tantangan dan harapan saya yaitu keterbatasan tenaga pendidik khusus, sarana prasarana memadai dan stigma masyarakat tentang ABK. Harapannya juga Pemerintah memberikan dukungan regulasi lebih besar dari sisi regulasi, pembiayaan, dan guru pembimbing khusus agar sekolah lebih berjalan optimal...” (#CW07#Ibu FL#Pendidik SMAN 2 Muara Wahau#29 September 2025).



Gambar 4. Proses Wawancara dengan Pendidik SMAN 2 Muara Wahau
 (Sumber: Dokumentasi Peneliti di TK Negeri 1 Pembina, 2025)

Dengan kata lain, hasil penelitian mengenai implementasi pendidikan inklusif secara keseluruhan pada jenjang TK s/d. SMA di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutim masih perlu dilakukan peningkatan dari berbagai aspek terutama penyediaan alat bantu sesuai kebutuhan disabilitas dan memandang siswa berkebutuhan khusus berhak mendapat pendidikan yang layak, ramah, aman dan mampu memobilisasi kesiapan mereka dalam berhidup sebagai bagian dari masyarakat serta memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan seperti siswa reguler lainnya. Sebagaimana pendapat Lambrecht et al., (2022) bahwa pendidikan inklusif di Jerman menekankan kolaborasi antar kepemimpinan Kepala Sekolah Inklusif dan Guru Pendamping Khusus dalam implementasi proses belajar berbasis IEP (*individualised education planning*) yang memediasi kebutuhan disabilitas dengan baik.

2. Pembiayaan Pendidikan Inklusif untuk Siswa Berkebutuhan Khusus

Pembiayaan pendidikan inklusif merupakan penyediaan dana dan sumber daya lain untuk memastikan anak berkebutuhan khusus (ABK), dapat belajar bersama di lingkungan sekolah reguler tanpa diskriminasi, serta mendapat dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dana ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan khusus seperti honor guru pendamping, pembelian alat pendidikan inklusif, penyediaan sarana-prasarana, dan kegiatan pendukung agar pendidikan inklusif dapat terwujud dan semua siswa memiliki akses yang setara. Menurut Suriadi (2017) pembiayaan pendidikan inklusif masih bergantung pada Pemerintah dan belum terjadi pemerataan di berbagai tempat yang berdampak kualitas layanan pendidikan inklusif belum maksimal dan memerlukan dukungan berbagai pihak.

a. TK Negeri 1 Pembina Samarinda

Sumber pembiayaan pendidikan inklusif di TK Negeri 1 Pembina Samarinda diketahui bersumber dana Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional PAUD-ABK, APBD Kota Samarinda dan partisipasi masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Ro sebagai Kepala TK .

“....kalau tentang pembiayaan ini, saya mengikuti pedoman berlaku dari Pemerintah Samarinda seperti belanja modal/operasional yang terkait sekolah inklusif, gaji/insentif guru pendamping khusus (GPK), dukungan PLDPI, dan program-program inklusif lainnya, dari sumber BOS maupun BOP PAUD-ABK dari Pemerintah Pusat dan mengikuti pelatihan berjenjang tentang Pendidikan Inklusif secara mandiri di Platform Merdeka Mengajar terutama bagi tenaga pendidik kami yang telah berstatus sebagai “Guru Penggerak”...(#CW05#Ibu Ro#Kepala TK Negeri 1 Pembina Samarinda#20 September 2025).

Ketika peneliti juga menanyakan “apa hambatan yang dirasakan dalam pembiayaan pendidikan inklusif?”. Ibu Ro menjelaskan secara jelas bahwa kendala dirasakan ialah minimnya gaji yang sesuai dan ketersediaan Guru Pembimbing Khusus dari Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Berikut petikan hasil wawancara tersebut.

“...Yang paling saya rasakan sampai saat ini masih minimnya gaji yang sesuai apalagi untuk memfasilitasi guru yang ada mengikuti pelatihan pendidikan inklusif. Juga ya kayak saya merekrutmen guru pendamping dari mahasiswa yang pernah magang, kadang mereka tidak bertahan lama. Sehingga saya merasa perlu adanya Guru Pembimbing Khusus yang disediakan oleh Dinas Pendidikan”... (#CW06#Ibu Ro#Kepala TK Negeri 1 Pembina Samarinda#20 September 2025).

Peneliti juga melakukan wawancara pada Ibu DF sebagai perwakilan Komite tentang pelibatan orangtua dalam pembiayaan inklusif. Diketahui orangtua yang memiliki anak disabilitas diminta partisipasi untuk pembiayaan bagi honor *shadow teacher* yang tidak dibatasi nominalnya sesuai kemampuan. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Ibu DF.

“...Iya, kami dilibatkan juga dalam pembiayaan untuk anak berkebutuhan khusus. Pihak Wali Kelas yang mengkomunikasikan masing-masing paguyuban yang memiliki anak ABK. Lalu, pembayaran dilakukan sebulan sekali. Pihak sekolah menyampaikan tidak ada batasan sesuai kemampuan dan bukan pemaksaan maupun pungli seperti yang viral beberapa minggu ini”... (#CW07#Ibu DF#Komite Sekolah TK Negeri Pembina 1 Samarinda#08 November 2025).

Zabeli & Gjelaj (2020) memandang investasi dan kolaborasi pelibatan orang tua penting sebagai solusi terhadap tantangan bagi pengajar anak usia dini untuk menghasilkan pembelajaran inklusif yang berkualitas. (Buchner & Proyer, 2020) Dukungan berupa finansial dalam konteks PAUD berdampak positif pada peningkatan layanan pendidikan dan dibutuhkan oleh guru. Dengan kata lain, temuan penelitian tentang pembiayaan pendidikan inklusif di jenjang PAUD di TK Negeri 1 Pembina sebagai sekolah inklusif dapat disimpulkan sudah baik. Namun, masih membutuhkan dukungan terutama ketersediaan media sumber belajar untuk anak disabilitas lainnya dan tenaga pendidik inklusif yang lebih baik.

b. SDN 006 Sangkulirang & SMPN 1 Sangkulirang

Dua sekolah di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur yakni SDN 006 dan SMPN 1 diketahui untuk pembiayaan pendidikan inklusif bersumber dari BOSDA yang difokuskan bantuan mengikuti pelatihan bagi pendidik yang bertugas sebagai Guru Pendamping Khusus. Akan tetapi, sejauh ini belum ada kerjasama terkait pembiayaan pendidikan dengan pihak lainnya dalam lingkup penyediaan alat bantu disabilitas dan ketersediaan fasilitas lainnya selain area mobilitas untuk disabilitas fisik-motorik (Tunadaksa). Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 006 dan SMPN 1 Sangkulirang yang dilakukan oleh peneliti.

“...pembiayaan pendidikan inklusif di SDN 006 Sangkulirang bersumber pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang masih difokuskan pada bantuan bagi guru mengikuti pelatihan maupun pendampingan untuk pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Kami belum memiliki kerjasama dengan pihak lainnya dikarenakan keterbatasan SDM dan pengalaman terkait pendidikan inklusif di SD...” (#CW08#Ibu Ha#Kepala SDN 006 Sangkulirang#12 September 2025).

“...Sekolah kami (SMPN 1 Sangkulirang) masih baru sebagai sekolah inklusif. Jadi, komponen pembiayaan pendidikan inklusif terinput di RKAS dan RKAT yang dialokasikan berupa bantuan bagi pendidik mengikuti pelatihan tentang pembelajaran inklusif. Sehingga kemitraan pun belum ada terjalin...” (#CW02#Bapak MF#Kepala SMPN 1 Sangkulirang#12 September 2025).

Dari hasil wawancara di atas, ditemukan pembiayaan pendidikan inklusif di SDN 006 dan SMPN 1 bersumber dana BOS dan dianggarkan melalui RKAT dan RKAS berupa bantuan bagi pendidik mengikuti pelatihan atau pendampingan pembelajaran inklusif. Sementara, Sumarni (2019) menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan inklusif harus menyediakan dana untuk evaluasi, revisi kurikulum, media, teknik, dan insentif ahli. Garnida (2015) dalam (Damayanti et al., 2019) menyoroti perbedaan fasilitas, staf, dan perlengkapan antara kelas inklusif dan normal. Inklusi membutuhkan lebih banyak dana daripada sekolah konvensional. Untuk menyediakan pendidikan inklusif yang unggul dan berkelanjutan, sekolah harus siap memenuhi semua kebutuhan. Bahkan, juga pentingnya pendampingan bagi sekolah yang belum menjadi sekolah inklusif melalui kolaborasi dengan pihak Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) melibatkan Mahasiswa sebagai Pendamping dalam program Magang Berdampak (Yusuf et al., 2023).

c. SMAN 2 Muara Wahau

Selanjutnya, peneliti juga menemukan pembiayaan pendidikan inklusif di SMAN 2 Muara Wahau diketahui bahwa penggunaan operasional untuk pelatihan guru dan penyediaan kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus seperti penyediaan media adaptif serta aksesibilitas prasarana sekolah. Berikut merupakan petikan kutipan hasil wawancara dengan Bapak IS sebagai Kepala SMAN 2 Muara Wahau.

“...Mengacu pada SK penetapan yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan provinsi kaltim No: 400.3/120604/disdikbud.V/2023 telah menetapkan sebagai SMAN 2 Muara Wahau sebagai lembaga pendidikan inklusif sebagai dasar penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, maka kami memiliki mekanisme rekrutmen calon peserta didik dilakukan secara terbuka melalui penerimaan peserta didik baru sesuai regulasi Dinas Pendidikan Prov Kaltim yakni memberikan afirmasi berupa kelengkapan administratif dan mengedepankan asesmen awal yang melibatkan orangtua dan guru dan panitia. Sehingga, komponen pembiayaan masuk khususnya pada komponen sarana, pelatihan guru dan penyediaan kebutuhan belajar ABK. Prosedur melalui

musyawarah dan verifikasi komite dan persetujuan Kepsek sesuai dengan RKAS..." (#CW07#Bapak IS#Kepala SMAN 2 Muara Wahau#29 September 2025).

"...Sumber pembiayaan kami meliputi BOS reguler, sumbangan dari Dinas Pendidikan Provinsi berupa alat bantu disabilitas tertentu misalnya media adaptif, Komite sekolah dan pihak ketiga seperti CSR Perusahaan. Namun, bantuan lebih banyak dimanfaatkan untuk pelatihan guru dan sebagai bentuk dukungan Pemerintah setempat maupun pihak lainnya. Untuk kebutuhan menambah sarana khusus disabilitas lainnya berupa ketersediaan alat khusus seperti Braile, media alat dengar dan ruang terapi masih terbatas. Disebabkan, masih mengajukan proposal dan menunggu persetujuan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Karena fasilitas yang kami miliki diantaranya adalah sarana dasar berupa ruang kelas ramah bagi siswa berkebutuhan khusus, akses aksesibilitas bagi disabilitas fisik-motorik dan ruangan layanan konseling serta laboratorium IPA, Bahasa dan Komputer yang juga digunakan oleh siswa inklusif dan reguler di SMAN 2 Muara Wahau" ... (#CW08#Bapak IS#Kepala SMAN 2 Muara Wahau#29 September 2025).

Dapat dipahami, bahwa SMAN 2 Muara Wahau juga memiliki sumber pembiayaan inklusif selain BOS Reguler seperti hibah Dinas Pendidikan Provinsi berupa media disabilitas tertentu misalnya media adaptif. Juga adanya harmonisasi pelibatan pihak-pihak lain untuk mendukung program pendidikan inklusif. Pihak tersebut ialah Komite Sekolah dan CSR Perusahaan setempat. Peneliti pun menanyakan kembali pada Bapak ZR sebagai Komite Sekolah yang telah bersedia di wawancara secara langsung. Pertanyaan yang diajukan berupa "bagaimana pihak sekolah SMAN 1 Muara Wahau melibatkan orangtua atau Komite dalam konteks pembiayaan pendidikan inklusif?". Menurutnya, pelibatan tersebut melalui jejaring orangtua yang bekerja di perusahaan untuk membantu pengusulan proposal CSR dan biaya sukarela yang tidak dianggap sebagai pungli. Berikut kutipan hasil wawancara Bapak ZR tersebut.

"...Tentang ini kami selalu dilibatkan dalam mengambil keputusan baik rencana anggaran maupun evaluasi hasil pelaksanaannya. Pihak sekolah melalui Kepala Sekolah juga melakukan pendataan orangtua siswa yang bekerja di perusahaan terdekat untuk mengusulkan proposal CSR. Juga diminta biaya sukarela bulanan untuk membantu siswa disabilitas di SMAN 2 Muara Wahau untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi yang dibutuhkan oleh guru" ... (#CW09#Bapak ZR#Komite Sekolah SMAN 2 Muara Wahau#10 November 2025).

"...Biaya sukarela tersebut tidak dianggap sebagai bentuk pungli karena disampaikan secara terbuka dan pihak Sekolah juga melaporkan hasil penggunaan anggaran secara berkala pada kami" ... (#CW10#Bapak ZR#Komite Sekolah SMAN 2 Muara Wahau#10 November 2025).

Temuan penelitian di atas, pembiayaan pendidikan di SMAN 2 Muara Wahau juga masih memfokuskan pada bantuan bagi pendidik mengikuti pelatihan/workshop/pendampingan pembelajaran pendidikan inklusif. Temuan penelitian ini senada dengan hasil penelitian Paccaud & Luder (2017) berjudul "*Participation Versus Individual Support: Individual Goals and Curricular Access in Inclusive Special Needs Education* dalam *Journal of Cognitive Education and Psychology*". Menurutnya, program pendidikan inklusif seyogyanya memerlukan dukungan berbagai berbentuk kolaborasi sesuai rekomendasi serta hasil konvensi PBB tentang pendidikan inklusif. Selanjutnya, hasil penelitian Aslindah & Mulawarman melaporkan bahwa kemampuan pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan praktik penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Aslindah & Mulawarman, 2022). Mengelola mekanisme keuangan secara efisien sangat penting bagi keberhasilan program pendidikan.

Variabel keuangan sangat penting untuk mendanai fasilitas dan infrastruktur pembelajaran inklusif di sekolah inklusif, meningkatkan kesejahteraan Guru Pendamping Khusus, dan menyediakan layanan lain bagi siswa berkebutuhan khusus. Mumpuniarti & Lestari (2019) menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa kesiapan guru sekolah reguler merupakan indikator esensial berkaitan aspek-aspek seperti implementasi pendidikan Inklusif, pembiayaan pendidikan untuk siswa disabilitas menjadi faktor yang paling mempengaruhi secara signifikan bagi pendidik pada jenjang TK s/d. SMP di Kota Yogyakarta.

Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh pada beberapa sekolah di Kota Samarinda (TK Negeri Pembina 1) dan Kabupaten Kutai Timur (SDN 006 Sangkulirang, SMPN 01 Sangkulirang, dan SMAN 2 Muara Wahau) mendeskripsikan sejauhmana implementasi pendidikan inklusif dan pembiayaannya yang masih membutuhkan kolaborasi berkelanjutan yang melibatkan orangtua siswa dan masyarakat pemerhati

pendidikan inklusif. Sehingga, penelitian selanjutnya dapat dilanjutkan dalam jumlah partisipan yang lebih besar. Sebab, keterbatasan penelitian ini difokuskan pada empat sekolah dan sepuluh partisipan penelitian untuk memaknai fenomena pemberian pendidikan inklusif di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur.

PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa pemberian pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus masih membutuhkan penguatan dan dukungan dari pihak *stakeholder* sebagai pemangku kepentingan terutama pembuatan standar pemberian pendidikan inklusif secara merata di setiap jenjang pendidikan sebagai dasar penyusunan anggaran dan pihak sekolah mampu mengimplementasikan dengan baik yang melibatkan seluruh elemen di lingkungan sekolah dan sekitar, terutama di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan juga partisipasi masyarakat untuk mendukung pemberian pendidikan inklusif masih dibutuhkan agar layanan inklusif terutama ketersediaan alat bantu disabilitas khusus semakin lengkap dan sesuai cita-cita Indonesia 2045 mendatang yakni pendidikan lebih berkualitas untuk semua. Penelitian ini juga berkontribusi secara empiris bahwa implementasi pendidikan inklusif perlu melibatkan tenaga profesional untuk mendukung tumbuh-kembang siswa berkebutuhan khusus terutama di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian, peneliti juga memberikan rekomendasi penelitian selanjutnya untuk memfokuskan pada pelibatan pemangku kepentingan dan komunitas peduli siswa inklusif untuk mendorong pemerintah agar program inklusif menjadi prioritas dalam bidang pendidikan. Sebab, pendidikan untuk semua dan kesetaraan untuk jenjang pendidikan selanjutnya di Perguruan Tinggi bagi siswa disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, D., Osman, R., Sisavath, S., & Boupha, B. (2025). Leading inclusive education initiatives: Comparative insights from Malaysia, Lao PDR, and Brunei. *International Journal of Developmental Disabilities*, 71(6), 814-823. <https://doi.org/10.1080/20473869.2025.2514639>
- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(1), 7-16. <https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587>
- Aslindah, A., & Mulawarman, W. G. (2022). Membangun masa depan melalui manajemen keuangan pendidikan yang efektif. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan (JIMPIAN)*, 2(2). <https://doi.org/10.30872/jimpian.v2i2.2606>
- Boyle, C., & Anderson, J. (2020). The justification for inclusive education in Australia. *Prospects*, 49(3-4), 203-217. <https://doi.org/10.1007/s11125-020-09494-x>
- BRIN. (2024). Profil BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Buchner, T., & Proyer, M. (2020). From special to inclusive education policies in Austria—developments and implications for schools and teacher education. *European Journal of Teacher Education*, 43(1), 18-36. <https://doi.org/10.1080/02619768.2019.1691992>
- Castleberry, A., & Nolen, A. (2018). Thematic analysis of qualitative research data: Is it as easy as it sounds? *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 10(6), 807-815. <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.03.019>
- Damayanti, T., Hamdan, S. R., & Khasanah, A. N. (2019). Kompetensi guru dalam proses pembelajaran inklusi pada guru SD negeri Kota Bandung. *Journal of Psychological Research*, 3(1), 22-35.
- Fatmawiyati, J., & Permata, R. S. R. E. (2023). Implementasi pendidikan inklusif di PAUD. *Flourishing Journal*, 2(8). <https://doi.org/10.17977/um070v2i82022p567-582>
- Firdaus, E. (2010, Juni). *Pendidikan inklusif dan implementasi di Indonesia*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pendidikan, Bandung.
- Fitriana, R. (2014). Penerapan standar pemberian pendidikan inklusif sebagai dasar penyusunan anggaran pada SD Pantara Tebet Jakarta. *Procedia Manufacturing*, 1, 112-125.

- Graham, L. J. (2023). *Inclusive education for the 21st century: Theory, policy, and practice* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003350897>
- Hafiz, A. (2017). Sejarah dan perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal As-Salam*, 1(3), 114–128.
- Insiatun, I., Karya, G., Ediyanto, E., & Sunandar, A. (2021). Implementasi pendidikan inklusi pada jenjang PAUD. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan*, 1(11). <https://doi.org/10.17977/um065v1i112021p873-878>
- Irwan Suryadi. (2023). Dampak pendidikan inklusif terhadap partisipasi dan prestasi siswa dengan kebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(8). <https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i08.597>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
- Kozibroda, L. V., Kruhlyk, O. P., Zhuravlova, L. S., Chupakhina, S. V., & Verzhihovska, O. M. (2020). Practice and innovations of inclusive education at school. *International Journal of Higher Education*, 9(7), 176–186. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n7p176>
- Kurniawati, N. K., Tampubolon, H., & Sihotang, H. (2019). Evaluasi implementasi Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan inklusif di sekolah menengah Garuda Cendikia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(2). <https://doi.org/10.33541/jmp.v8i2.2971>
- Lambrecht, J., Lenkeit, J., Hartmann, A., Ehlert, A., Knigge, M., & Spörer, N. (2022). The effect of school leadership on implementing inclusive education: How transformational and instructional leadership practices affect individualised education planning. *International Journal of Inclusive Education*, 26(9), 949–967. <https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1752825>
- Lochmiller, C. R. (2021). Conducting thematic analysis with qualitative data. *The Qualitative Report*, 26(6), 2029–2044. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.5008>
- Lopatina, H., Tsybuliak, N., Popova, A., Hurenko, O., & Suchikova, Y. (2024). Inclusive education in higher education institution: Are Ukrainian faculty members' ready for it? *Research in Education*, 118(1), 45–60. <https://doi.org/10.1177/00345237231207721>
- Makoelle, T. M., & Burmistrova, V. (2020). Funding inclusive education for equity and social justice in South African schools. *South African Journal of Education*, 40(4). <https://doi.org/10.15700/saje.v40n4a2037>
- Maulida, S., Maesaroh, & Widowati, N. (2023). Implementasi Perwal No. 76 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Kepunden Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2).
- Meijer, C. J. W., & Watkins, A. (2019). Financing special needs and inclusive education—from Salamanca to the present. *International Journal of Inclusive Education*, 23(7–8), 705–721. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1623330>
- Moberg, S., Muta, E., Korenaga, K., Kuorelahti, M., & Savolainen, H. (2020). Struggling for inclusive education in Japan and Finland: Teachers' attitudes towards inclusive education. *European Journal of Special Needs Education*, 35(1), 100–114. <https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1615800>
- Mumpuniarti, M., & Lestari, P. H. K. (2019). Kesiapan guru sekolah reguler untuk implementasi pendidikan inklusif. *JPK (Jurnal Pendidikan Khusus)*, 14(2). <https://doi.org/10.21831/jpk.v14i2.25167>
- Nadya, A., Purwanta, E., & Nurwangid, M. (2022). Konseptualisasi bimbingan karier bagi siswa berkebutuhan khusus. *Jurnal ORTOPEDAGOGIA*, 8(1). <https://doi.org/10.17977/um031v8i12022p27-34>
- Nafarin, W., Eljohn, G., Sari, Y., Haryaka, U., & Mulawarman, W. G. (2025). Strategi pengembangan model pembiayaan pendidikan inklusi: Solusi dukungan finansial berkelanjutan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 717–730.
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran (JTPP)*, 2(3), 793–800.

- Paccaud, A., & Luder, R. (2017). Participation versus individual support: Individual goals and curricular access in inclusive special needs education. *Journal of Cognitive Education and Psychology*, 16(2), 155–172. <https://doi.org/10.1891/1945-8959.16.2.205>
- Paseka, A., & Schwab, S. (2020). Parents' attitudes towards inclusive education and their perceptions of inclusive teaching practices and resources. *European Journal of Special Needs Education*, 35(2), 196–211. <https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1665232>
- Pudjiastuti, T. N., Purwaningsih, S. S., Budiarti, M., Yohanitas, W. A., Wulandari, P. R., Citta, G., & Hermawati, W. (2022). *Naskah kebijakan pengembangan riset teknologi alat bantu bagi penyandang disabilitas: Rekomendasi kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia*. BRIN. <https://doi.org/10.55981;brin.679>
- Rosala, M. (2022, Agustus 17). *How to analyze qualitative data from UX research: Thematic analysis*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/thematic-analysis/>
- Sahrudin, M., Djafri, N., & Suking, A. (2023). Pengelolaan pendidikan inklusif. *Jambura Journal of Educational Management*, 1, 45–58.
- Salim, A., Manubey, J., & Kuswandi, D. (2024). Neoliberalisme dan dampaknya bagi pendidikan Indonesia: Sebuah refleksi. *Jurnal Pendidikan*, 24(2). <https://doi.org/10.52850/jpn.v24i2.12484>
- Sangadji, K. (2022). Implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri Serang Pengasuh Kulon Progo. *Jurnal Studi Islam*, 9(2), 12–25.
- Sharma, U., Armstrong, A. C., Merumeru, L., Simi, J., & Yared, H. (2019). Addressing barriers to implementing inclusive education in the Pacific. *International Journal of Inclusive Education*, 23(1), 65–78. <https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1514751>
- Sumarni, S. (2019). Pengelolaan pendidikan inklusif di madrasah. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 17(2). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v17i2.631>
- Suriadi. (2017). Manajemen pendidikan inklusif di PAUD Indah 09 Yogyakarta. *Journal of Early Childhood and Inclusive Education*, 1, 34–46.
- Tah, J. K. (2025). Teachers' understanding of inclusive education and challenges in implementation in the English education system in Cameroon. *Policy Futures in Education*, 23(6), 1051–1066. <https://doi.org/10.1177/14782103251320812>
- Taufik, A. N., & Rahaju, T. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan inklusif untuk mewujudkan kesetaraan belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus tingkat SMA di Surabaya. *Publika*, 9(3). <https://doi.org/10.26400/publika.v9n3.p139-154>
- Utama, A. H. (2021). Model desain penyelenggaraan pendidikan inklusif. *Edudikara: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(3). <https://doi.org/10.32585/edudikara.v6i3.244>
- Yusuf, M., Anggarani, F. K., Wiliyanto, D. A., & Supratiwi, M. (2023). Program mahasiswa pendamping anak berkebutuhan khusus sebagai suporting guru pembimbing khusus di sekolah inklusi Kota Surakarta. *SPEED Journal: Journal of Special Education*, 7(1). <https://doi.org/10.31537/speed.v7i1.1236>
- Zabeli, N., & Gjelaj, M. (2020). Preschool teacher's awareness, attitudes and challenges towards inclusive early childhood education: A qualitative study. *Cogent Education*, 7(1), Article 1791560. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2020.1791560>

